

BAB I

PENDAHULUAN

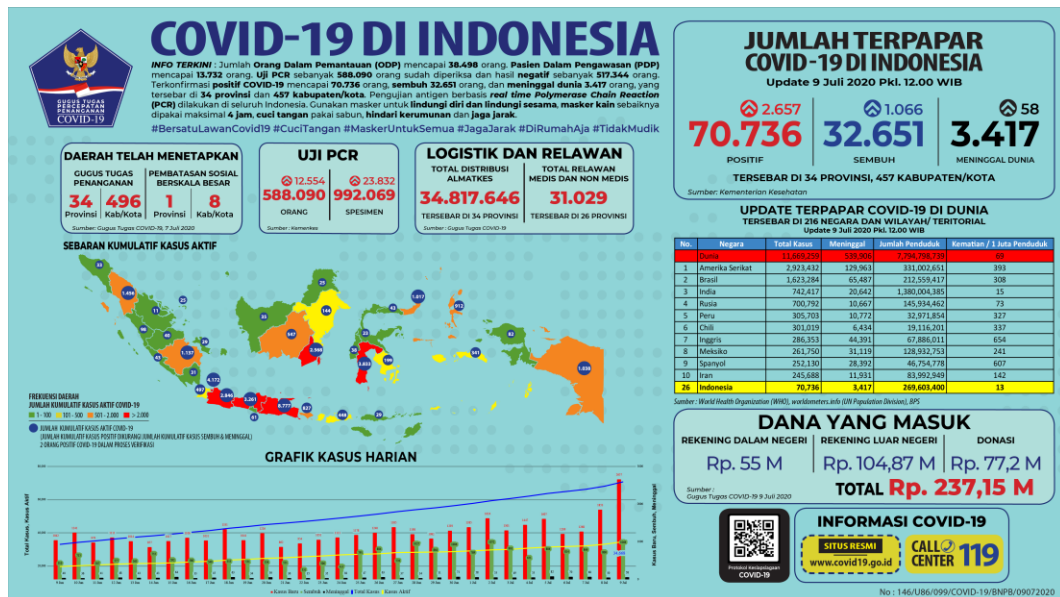
1.1 Latar Belakang

Coronavirus (Cov-19) 2019 adalah infeksi sistem pernapasan yang penyebabnya dari virus SARS-CoV-2. Wabah dimulai pada Desember 2019 di dekat Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia. Data Lebih dari 12,1 juta kasus telah dilaporkan di semua negara dan wilayah sejak 9 Juli 2020. Virus Corona tersebut saat ini telah membunuh lebih dari 500.000 orang di seluruh dunia..(www.mataram.tribunnews.com).

Sebelum pandemi ini menyebar secara global para ahli kesehatan sebenarnya telah memperingatkan untuk mulai meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan. Namun, pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan 213 kematian dan 9.692 kasus di 31 provinsi di China. Sejak itu telah dilaporkan di India, Filipina, Eropa, Australia, Jepang, Singapura, Vietnam dan Amerika Serikat. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengumumkan pada akhir Februari 2020 bahwa Indonesia telah terjangkit virus corona untuk pertama kalinya. Data yang dilaporkan tersebut terdapat dua orang (wanita 31 tahun dan ibu 64 tahun) terinfeksi COVID-19. (<https://www.cnnindonesia.com>).

Pada tanggal 9 Juli 2020 kasus virus corona di Indonesia mencapai 70.736 kasus. Jumlah pasien tersebut terdiri dari pasien sembuh corona ada 32.651 orang dan meninggal 3.417 orang tersebar di seluruh provinsi di seluruh Indonesia (www.COVID-19.go.id).

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*



Gambar 1.1 Peta Sebaran COVID-19 Di Indonesia per 9 Juli 2020
(Sumber : www.COVID-19.go.id)

Saat ini Indonesia dihadapi pandemi virus COVID-19 yang telah menyebar keseluruh pelosok negeri dari kota besar hingga pelosok desa terpencil. Pandemi ini bukan saja menyerang kesehatan masyarakat saja melainkan telah menyerang perekonomian rakyat kecil akibat diberlakukan karantina wilayah dalam menghambat penyebaran virus tersebut. Efek karantina wilayah sangat berkorelasi terhadap dampak ekonomi rakyat terutama rakyat kecil sehingga banyak masyarakat hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti Bansos (Bantuan Sosial) dari kementerian sosial, kementerian desa tertinggal hingga bantuan dari pemerintah daerah seperti gubernur, bantuan dari BUMN maupun bantuan dari perusahaan lokal maupun lembaga swadaya masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat (www.liputan6.com/bisnis/read/4211714/).

Pandemi yang muncul secara massif dan cepat di Indonesia menyebabkan ketidaksiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi wabah bencana ini. Ketidaksiapan pemerintah tercermin pada saat timbul polemik ketika kebijakan pemerintah pusat berupa peraturan seperti Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), , maupun keputusan Permen (Peraturan Menteri) seperti Permenkes No.9 tahun 2020 tentang PSBB yang seolah tidak terkoordinasi sehingga menimbulkan polemik terhadap tindakan para pemimpin-

pemimpin daerah. Polemik ini terjadi dimulai dari daerah tingkat satu hingga tingkat kelurahan atau desa dalam upaya penanganan pandemi COVID-19.

Dimulai dari pemimpin daerah setingkat gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meminta dilakukan lockdown atau karantina wilayah dalam upaya menghambat penyebaran virus COVID-19 namun pada saat itu Pihak pemerintah pusat mengatakan Gubernur DKI Jakarta untuk memberlakukan karantina wilayah di Jakarta ditolak. Penyebabnya, Pemerintah pusat lebih memilih menerapkan sebuah kebijakan dengan pola pembatasan sosial berskala besar (PSBB). (<https://news.detik.com/berita/d-4959167/>) namun walaupun terlambat beberapa minggu kedepan aturan karantina wilayah yang menurut pemerintah pusat diartikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tersebut disetujui oleh pemerintah pusat (<https://www.suara.com/news/2020/04/10/025500/>).

ANCAMAN DENDA PELANGGAR PSBB DI JAKARTA

PELAKSANAAN PSBB

- ▶ Sekolah, kantor, kegiatan agama, dan fasilitas umum
 - ▶ Belajar, bekerja, dan ibadah di rumah
 - ▶ Fasilitas umum tutup
 - ▶ Layanan belanja jarak jauh di 105 pasar
 - ▶ Hanya 8 sektor* yang boleh lakukan kegiatan

* 1) sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, kebutuhan sehari-hari, industri strategis lainnya

DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 14 hari mulai 10 April 2020. Langkah ini wajib dipatuhi masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19.

SANKSI PELANGGARAN

- ▶ Pidana penjara paling lama 1 tahun
- ▶ Pidana denda paling banyak Rp 100 juta

Moda transportasi

- ▶ **Transportasi umum**
 - ▶ Jam operasional 06.00-18.00 WIB
 - ▶ Jumlah penumpang 50% dari kapasitas
 - ▶ Ojek online tidak bawa penumpang, hanya barang
- ▶ **Kendaraan pribadi**
 - ▶ Tidak ada larangan akses
 - ▶ Jumlah penumpang dibatasi

Kegiatan lainnya

- ▶ Tidak ada kerumunan >5 orang
- ▶ Pernikahan hanya di KUA, resepsi ditiadakan

▶ Bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan
Distribusi sembako mulai 9 April 2020

SUMBER: PIDATO GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASUVEDDHA, UU 8/2018, KATADATA, IDN.CO, ANDREA LIOWINA, DAN HURBAHUTORO

KATADATA

Gambar 1.2 Aturan PSBB di Jakarta
(www.katadata.co.id)

Pemerintah pusat telah mengeluarkan peringatan keras kepada tiga kepala daerah diantaranya adalah gubernur Kalimantan Timur, walikota Tegal dan walikota Tasikmalaya untuk menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada lingkungan terkait. Perbedaan signifikan antara pemerintah pusat dan daerah adalah bahwa kebijakan pemerintah pusat menekankan bahwa kebijakan penguncian tidak boleh diadopsi oleh pemerintah daerah (<https://www.wartaekonomi.co.id/>).

Sikap bersebrangan tidak saja dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat satu, maupun tingkat dua, namun setingkat kelurahan atau desa banyak yang merasa tidak sesuai antara kondisi masyarakat di daerahnya terhadap kebijakan pemerintah pusat. Diawali dari pembagian bantuan sosial, tindakan yang dilakukan oleh kepala desa di Kabupaten Subang merasa di permmainkan oleh Pemerintah pusat. Ini dipicu oleh kebijakan dukungan bagi warga yang terkena virus. Kepala desa memprotes pemerintah pusat dan gubernur Jawa Barat. Dia berfikir bahwa kebijakan bantuan tidak lain adalah kekacauan bagi penduduk desa. (www.jabar.suara.com). Kemudian permasalahan ditempat lain, Didaerah Istimewa Yogyakarta banyak data penerima dana bansos dari pemerintah pusat terkait COVID-19 sering berubah-ubah sehingga membingungkan banyak kepala desa pada saat penyalurannya (www.Kumparan.com). Selain itu, efek dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menimbulkan krisis sosial ekonomi berupa peningkatan jumlah pengangguran di masyarakat desa. Peningkatan jumlah pengangguran ini apabila tidak ditanggulangi secara cermat dapat memunculkan potensi kriminalitas diantara masyarakat desa, sehingga perlu penanganan secara komprehensif.

Banyaknya sikap bersebrangan yang dilakukan oleh kepala daerah terutama kepala desa menyangkut penanganan pandemi COVID-19 mengindikasikan tidak adanya pendekatan yang responsif, terkordinasi, maupun komperhensif dalam upaya menghambat penyebaran virus ini secara meluas di daerah-daerah khususnya pedesaan, setelah dampak dari kebijakan pemerintah pusat seperti PSBB ini telah berdampak terhadap berhentinya roda perekonomian masyarakat desa.

Kegelisahaan kepala daerah tersebut dirasa wajar karena di daerah terutama di desa-desa fasilitas kesehatannya sangat terbatas dalam melayani kesehatan masyarakat. Apalagi yang paling utama adalah dampak sosial ekonomi masyarakat desa apabila terjadi wabah di daerahnya. Disamping itu dengan ditutupnya pasar tradisional sebagai wadah perekonomian rakyat sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat pedesaan merupakan hal yang harus cepat diatasi untuk meredam dampak konflik horisontal sesama warga desa di saat terjadi pandemi ini, selain itu pemerintah desa harus menanggung akibat gelombang pengangguran dari masyarakat kota yang sangat besar akibat ditutupnya sentra-sentra industri sehingga mengakibatkan banyak masyarakat berbondong bondong mengadu nasibnya untuk kembali ke desa karena di kota sudah sangat sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga mereka sangat berharap apabila di desa akan menemukan penghasilan yang lebih baik

dibanding di kota. (<https://jatim.suara.com/read/2020/04/25/110728/>). Namun di desa lapangan pekerjaan yang tersedia juga cukup terbatas sehingga akan timbul dampak sosial akibat arus balik masyarakat kota ke desa. Hal tersebut tentunya akan berkorelasi terhadap ketersediaan dana desa dan dana bantuan dalam penanganan warga desa untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Peran kepemimpinan kepala desa dituntut bertanggung jawab secara vertikal keatas terhadap implementasi undang-undang maupun peraturan negara namun disisi lain seorang kepala desa merupakan jembatan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat desa dengan penerapan undang-undang atau peraturan negara. Secara ideal seorang kepala desa harus mempunyai kapasitas pemahaman terhadap peraturan negara serta nilai-nilai yang diterapkan di masyarakat, namun beragamnya latar belakang pendidikan, tingkat pengetahuan bermasyarakat serta nilai-nilai kepemimpinan yang melekat dalam diri kepala desa sehingga membuat semakin beragamnya pola kepemimpinan kepala desa. Pada saat krisis atau pandemi tuntutan rakyat harus dipenuhi secara cepat dan tepat sehingga terkadang tidak sedikit kepemimpinan kepala desa yang melanggar rambu-rambu aturan negara disebabkan ketidakpahaman dalam menjalankan peraturan negara dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat di saat krisis melanda wilayah desanya.

Kepala desa Panggunghardjo, kecamatan Sewon kabupaten Bantul, DI Yogyakarta merupakan salah satu dari ribuan kepala desa yang mampu membuat beberapa kebijakan untuk mencegah konflik sosial akibat Bansos. Beberapa kebijakan terkait efek dari pandemi seperti penyaluran dana desa kepada 1.725 warga yang belum terdata oleh pemerintah pusat. Efek dari pandemi ini menyebabkan warga yang sebelumnya digolongkan bukan dari kalangan penerima bantuan pemerintah menjadi golongan yang berhak mendapatkan bantuan akibat kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau kehilangan pekerjaan yang disebabkan efek karantina wilayah. Dengan Dana Desa dari Pendapatan Pokok Desa dan BLT dari APBD dan APBN, semoga seluruh warga terdampak pandemi COVID-19 berhak mendapat bantuan dari pemerintah. Peran kepemimpinan kepala desa sangat dominan dalam upaya mencegah konflik sosial dengan mengedepankan keadilan dan peran serta warga dalam upaya bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 (<http://jogja.idn-news.com>).

Sejatinya banyak desa-desa di Indonesia telah menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penanganan bencana dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan baik sehingga dapat diapresiasi sebagai model penanganan pandemi COVID-19.

Penelitian ini membahas peran kepemimpinan di desa yang berada di wilayah Indonesia tepatnya pulau Jawa yang di wakili oleh Desa Panggungharjo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peran kepemimpinan desa tersebut saat ini berupaya menerapkan strategi desa tangguh bencana yang telah digagas oleh pemerintah Republik Indonesia dalam upaya penanganan wabah COVID-19.

Desa Panggungharjo terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia . Berdasarkan bukti sejarah, Desa Panggungharjo berdiri pada tahun 1946 dan mengatur pemerintah Desa sesuai dengan maklumat nomor 7, 14, 15, 16, 17, 18 Yogyakarta. Tanggal 24 Desember 1946 ditetapkan tanggal perayaan Desa Panggungharjo. Menyusul pengumuman itu, Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 ditegaskan kembali oleh Pemerintah Khusus Republik Indonesia, Yogyakarta Seputar perubahan wilayah desa dan nama daerah. Isi undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penggabungan tiga kecamatan yaitu Cabeyan, Prancak dan Krapyak telah menjadi desa baru yang disebut Desa Panggungharjo.

Hardjo Sumarto yang diangkat menjadi pemimpin pertama di Desa Panggungharjo sesuai dengan Keputusan pada tanggal 23 September 1947 yang disyahkan melalui keputusan pemda Yogyakarta Nomor 148/D.Pem.D/OP. Desa Panggungharjo sejauh ini sudah enam kali dipimpin oleh beberapa lurah atau kepala desa diantaranya adalah Hardjo Sumarto, Pawiro Sudarmo, R. Broto Asmoro, Siti Sremah Sri Jazuli, H. Samidjo dan saat ini Desa Panggungharjo dipimpin seorang lurah atau kepala desa Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt.

Visi Pemerintah Desa Panggungharjo berupaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bebas serta sejahtera serta berwawasan lingkungan, bersih, transparan dan bertanggung jawab.

Visi diatas memberikan pengertian bahwa pemerintah Desa Pangangharjo ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan serta bertanggung jawab serta mewujudkan kehidupan yang berdikari serta sejahtera dalam kehidupan yang demokratis. Arti dari masing-masing kata dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bersih dalam arti pemerintahan yang dilandasi keikhlasan dan kesucian dan semangat dedikasi yang tinggi.

Transparan dapat diartikan bahwa semua keputusan bisa dibuat terbuka serta dapat diakses oleh publik.

Bertanggungjawab dapat diartikan bahwa pemerintah wajib mengambil segala sesuatunya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak lain. Jika sesuatu terjadi, maka mereka dapat dituntut, disalahkan, serta digugat.

Demokratis dapat diartikan sebuah kebebasan berpikir, ketidaksepakatan dan penerimaan pendapat orang lain. namun bila suatu keputusan telah diambil, maka harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mandiri merupakan analogi dari situasi dan kondisi dimana rakyat Pangunharjo mampu menggunakan motivasi serta potensi lokal dengan berbasis dari pola kehidupan sehari-hari.

Sejahtera dapat diartikan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga desa Pangunharjo yang terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tadi mencakup pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta kebutuhan etis serta kualitas lainnya, seperti kebersihan, lingkungan yang aman serta nyaman, hak asasi manusia serta partisipasi, serta perwujudan iman serta rasa takut kepada tuhan yang maha kuasa.

Berkesadaran lingkungan pada arti kelestarian lingkungan dijadikan menjadi spirit dari semua aktivitas pembangunan.

Sedangkan misi dari pemerintah desa Pangunhardjo adalah

- Menaikkan pelayanan yang profesional melalui pengelolaan desa yang responsif dan transparan sehingga tercipta tata kelola desa yang baik.
- Menciptakan pola sosial dan budaya yang dinamis dan kondusif.
- Meningkatkan kemampuan dan potensi kapasitas lokal guna menciptakan peluang bisnis.
- Memperbaiki kesejahteraan warga melalui pembangunan hijau partisipatif.
- Mewujudkan serta memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan non pemerintah.

Adapun esensi nilai untuk mencapai visi dan misi pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Partisipatif (keterlibatan)

Setiap warga desa Pangunharjo berhak melakukan partisipasi dalam pembangunan warga dengan berlandaskan prinsip-prinsip masyarakat seperti dari, oleh dan untuk warga. Sebab itu, setiap proses pengembangan desa wajib dilibatkan masyarakat desa, mulai perencanaan, pelaksanaan pemantauan hingga pemeliharaan..

2. *Transparan (keterbukaan)*

Ada sifat terbuka pada pemerintahan desa Panggungharjo dengan batasan yang wajar untuk menciptakan kepercayaan masyarakat desa.

3. *Demokratis*

Setiap orang diberi kebebasan buat mengekspresikan diri dan menghargai pendapat orang lain.

4. *Efektif dan Efisien*

Mengutamakan hasil terbaik dengan pengorbanan (waktu dan biaya) yang relatif kecil agar efektif dan efisien.

5. *Berbudaya*

Setiap langkah pembangunan sejalan dengan budaya serta tradisi pembangunan warga, sebagai akibatnya pemerintah desa selalu menjaga budaya serta karakter yang dihormati.

Menurut data sensus tahun 2018, jumlah penduduk Desa Panggungharjo adalah 28.141 jiwa, berpenduduk perempuan 14.001 jiwa dan laki-laki 14.140 jiwa.. Secara profesi petani dan karyawan swasta merupakan pekerjaan yang paling banyak di desa Panggungharjo. Usia penduduk desa Panggungharjo banyak didominasi usia produktif dengan tingkat Pendidikan umumnya lulusan setingkat SMA/SMK.

Wilayah Panggungharjo adalah salah satu desa di daerah Bantul yang berada di dekat kota D.I, Yogyakarta. Secara lebih rinci batas desa Panggungharjo adalah di sebelah utara dari pusat kota Yogyakarta, sebelah barat desa Tirtonirmolo dan wilayah Pendowoharjo, bagian timur desa Bangunhardjo, serta di wilayah bagian selatan adalah desa Timbulhardjo.

Wilayah Desa Panggungharjo merupakan lokasi ekonomi yang strategis dikarenakan Desa Panggungharjo dekat dengan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta. Selain itu indikator sebagai wilayah ekonomi strategis ditunjukkan bahwa penggunaan lahan di Desa Panggungharjo telah berubah secara dramatis selama lima tahun terakhir, dengan sekitar 2% dari lahan sawah diubah menjadi kegiatan perumahan dan komersial per tahun.

Dari segi pertanian, lahan sawah yang luas perlu diubah menjadi lahan kering dan sisa lahan pertanian perlu dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan pangan masyarakat.

Posisi letak geografi serta aspek demografi merupakan keuntungan pemerintah desa panggungharjo dalam upaya membangun wilayah dan masyarakat pedesaan

menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Namun di era pandemi COVID-19 keuntungan letak geografi dan aspek demografi menjadi tantangan pemerintah desa Panggungharjo dalam menghadapi wabah yang sedang dihadapi bersama oleh bangsa Indonesia.

Pemerintah desa Panggungharjo meluncurkan gerakan panggung tanggap COVID-19 (PTC-19). Melalui gerakan ini Pemdes mengajak warga desa Panggungharjo untuk dapat melaporkan Keadaan kesehatan dan ekonomi keluarga dalam rangka pencegahan, pengendalian atau penanggulangan dampak COVID-19 terhadap masalah sosial, kesehatan dan ekonomi.

Pemerintah desa Panggungharjo menyediakan formulir yang dapat diunduh diakses lewat online <http://bit.ly/Laporpanggungtanggapcovid19> Pemdes melakukan *assessment* untuk memetakan kondisi warga desanya baik klinis maupun non-klinis. Lewat formulir ini diharapkan muncul data yang bisa digunakan untuk menentukan pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa Panggungharjo.

Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt., sebagai kepala desa Panggungharjo menjelaskan bahwa gerakan tanggap Covid-19 ini adalah upaya nyata Pemerintah Desa menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup warganya.



Gambar 1.3 Kepala Desa Panggungharjo
(Sumber : <http://www.panggungharjo.desa.id>)

Pemerintah desa Panggungharjo perlu berbuat lebih baik untuk menjamin keselamatan warganya. Namun, pemerintah desa Panggungharjo sangat mengandalkan partisipasi warga dalam mengisi formulir online yang disediakan oleh pemerintah.

Data yang diperoleh dalam forum tanggap COVID-19 menunjukkan, penyebaran COVID-19 berdasarkan aktivitas warga desa Panggungharjo selama 14 hari

terakhir. Informasi ini penting untuk memperkirakan potensi dampak terhadap penduduk desa, serta munculnya infeksi dan efek non-klinis pada penduduk yang mungkin kehilangan pendapatan selama krisis ini.

Ia juga menambahkan bahwasanya data ini nantinya juga dibutuhkan untuk identifikasi modal sosial agar bersama-sama mendorong tumbuhnya kembali budaya gotong royong mengatasi permasalahan ini. Melalui formulir online <http://bit.ly/dukungpangungtanggapcovid19> warga desa bisa ikut berperan aktif bersama-sama mendukung gerakan pangung tanggap COVID-19.

Dalam upaya pengentasan ekonomi terhadap warga yang terdampak langsung maupun tidak langsung pada masa ini, kepala desa panggunghardjo mulai mendata warga desa yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui musyawarah desa.

Dalam MUSDES (Musyawarah Desa) kali ini, PEMDES (Pemerintah Desa) memberikan informasi kepada warga tentang DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebuah informasi terpadu jaminan sosial dan tingkat respon PTC-19. MUSDES BLT menyelenggarakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan tujuan untuk mengkaji informasi yang ada sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian dengan keadaan saat ini dapat diganti tanpa kuota baru untuk setiap desa tetangga.

Beberapa tindakan yang menginspirasi untuk melindungi warga desa dari ancaman pandemi COVID-19 dibidang sosial, ekonomi, Kesehatan maupun pendidikan telah menjadikan beberapa indikator bahwa kepemimpinan kepala desa Panggunghardjo diduga telah menerapkan prinsip-prinsip dari Sebagian ciri-ciri kepemimpinan transformasional yaitu motivasi inspirasi.

Kejadian diatas merupakan cerminan pola kepemimpinan seorang kepala desa dalam melakukan motivasi inspirasi ke masyarakat. Sejatinnya seorang kepala desa merupakan suri tauladan bagi warga desa dalam melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat desa. Pada saat warga desa dan aparat desa merasa terinspirasi oleh pola kepemimpinan kepala desa maka akan sangat mudah dalam membentuk sinergi dalam upaya melakukan pembangunan desa serta melakukan penanganan permasalahan secara bersama sama. Pola kepemimpinan yang dapat menginspirasi merupakan unsur yang terdapat dalam kepemimpinan transformasional yang telah dikembangkan oleh Bass.

Pola kepemimpinan transformasional diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian kepada bawahannya dalam mencapai tujuan bersama demi kepentingan bersama. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan peran pemimpin transformasional

sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah masyarakat desa. Penerapan peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dan peraturan-peraturan lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 harus dilaksanakan secara komperhensif, responsive dan terukur agar kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan kebutuhan ekonomi masyarakat desa dapat terpenuhi tanpa harus melanggar aturan-aturan yang berlaku. Selain itu peran kepemimpinan kepala desa sangat diharapkan dalam mengajak masyarakat desa secara bersama-sama ikut aktif dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Sejatinya pemerintah pusat melalui departemen dalam negeri telah memberikan pedoman umum kepada pemimpin daerah untuk menanggapi pandemi COVID-19 termasuk para kepala desa. Diharapkan setiap kepala desa menerapkan Langkah-langkah pedoman pelaksanaan tersebut supaya setiap desa diseluruh Indonesia menjadi desa tangguh bencana COVID-19.



Gambar 1.4 Desa Tangguh COVID-19

(Sumber : <https://www.caritra.org/2020/04/16/corona>)

Nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Hal tersebut sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Ardillah et al., 2018).

Pemerintah desa adalah bagian dari sub-sistem pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain kepala negara, kepala desa harus mengemban peran dan tanggung jawab yang sama ketika menangani isu-isu COVID-19 di daerah masing-masing. (Kementrian Dalam Negri, 2020).

Paper ini akan mengelaborasi peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan kebijakan tanggap darurat bencana khususnya penanganan bencana penyebaran COVID-19.



Gambar 1.5 Kepala Desa Panggungharjo dalam Penanganan COVID-19
(Sumber : <https://jogjadaily.com/2020/06/>)

Beberapa para peneliti sudah melakukan aneka macam bidang penelitian pada bidang kepemimpinan. Berawal pada tahun 1900-an sampai 1950-an, analisis kepemimpinan awal berfokus di disparitas perilaku antara pemimpin serta pengikut. Fokus peneliti adalah pada situasi yang mempengaruhi keterampilan dan kemampuan, karena selama ini hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada sifat atau karakteristik yang dapat menggambarkan secara utuh kemampuan seorang pemimpin. Selanjutnya, studi kepemimpinan berfokus pada karakteristik pemimpin yang efektif. Peneliti menggunakan model darurat dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi karakter pemimpin sukses. Dalam model kontingansi, para peneliti memeriksa hubungan antara karakteristik pribadi, keadaan, dan efektivitas kepemimpinan. Penelitian kepemimpinan

masih terfokus pada perilaku pribadi pemimpin, yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Dia menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah isu kunci untuk kepemimpinan dan pemimpin, tetapi keduanya dikenal sebagai entitas yang kompleks. Selanjutnya kepemimpinan transaksional maupun transformasional yang telah dikembangkan oleh Bass (1985) telah melampaui konsep kepentingan manusia. Menurut teori hierarki minat, kebutuhan tingkat rendah, seperti kebutuhan fisik, keamanan, dan harapan akan dapat dipenuhi oleh pola kepemimpinan yang bersifat transaksional. Tetapi visualisasi diri hanya mungkin jika dilaksanakan oleh kepemimpinan yang melakukan perubahan transformasional. (Rosenhead et al., 2019).

Kepemimpinan berlandaskan transaksional berfokus pada interaksi antara pemimpin dan pengikut. Pertukaran didasarkan pada kesepakatan tentang tugas dan hadiah untuk menyelesaikan tugas itu. Ada dua karakteristik utama dari tipe ini: (1) pemimpin menggunakan seperangkat penghargaan untuk memotivasi para pengikutnya; (2) Pemimpin harus mengambil tindakan korektif hanya jika bawahannya tidak mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, kepemimpinan berdasarkan transaksional mengarah pada upaya untuk bertahan atau mempertahankan situasi saat ini. (Rinaldi et al., 2018) Sementara itu, pemimpin dengan berlandaskan perubahan, atau biasa disebut kepemimpinan karismatik dapat memanasifestasikan kebiasaan yang mendorong pengikutnya mencapai harapan. Dengan cara tersebut, pengikutnya menjadi lebih percaya diri, menghargai, dan dihormati. Mereka tidak berjalan sesuai rencana. Corak selama dua dekade terakhir didasarkan pada upaya para pemimpin untuk menambah nilai keyakinan dan aspirasi yang membuat kepemimpinan berkembang pesat (Rinaldi et al., 2018)

Kepemimpinan berdasarkan sifat transformasional artinya kepemimpinan yang meliputi upaya perubahan organisasi (menggunakan kepemimpinan yang didesain guna mempertahankan tren ini). Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam organisasi menghadapi tuntutan pembaruan dan perubahan. seseorang pemimpin bisa merubah bawahannya pada empat cara yang dikenal model Empat (I) Bass model (Allameh & Davoodi, 2011), yaitu: *Idealized influence*. Pemimpin transformasi memberikan contoh dan menjadi contoh perilaku, sikap, dan bawahan. Dia sangat memperhatikan kebutuhan bawahannya, dia mengambil risiko bersama, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi, dia memberikan visi dan misi, dia menanamkan kebanggaan pada bawahannya. Orang yang berada di bawah tekanan ingin melakukan apa yang dilakukan

pemimpin karena mereka memiliki rasa hormat, kekaguman, dan kepercayaan pada pemimpin mereka. Hal ini sangat penting pada hal mengikuti keadaan menggunakan perubahan, terutama yang radikal serta fundamental. Motivasi Inspirasi (*Inspirational Motivation*) merupakan pola pemimpin transformasional akan mendorong pengikut mereka dengan jelas mengartikulasikan harapan yang tinggi, menggunakan berbagai simbol, berfokus pada upaya atau tindakan, dan hanya menetapkan tujuan penting, selanjutnya adalah stimulasi intelektual (*Intellectual Stimulation*). Para pemimpin perubahan ingin membangun lingkungan yang aman bagi kreativitas dan penemuan. Perbedaan pendapat dianggap biasa. Pemimpin mendorong bawahannya untuk memunculkan ide-ide dan solusi baru untuk masalah mereka, perlu ditingkatkan dari hari kehari. Pertimbangan Individu (*Individualized Consideration*), merupakan pola kepemimpinan transformasional yang memperhatikan pengikut-pengikutnya untuk terus berkembang dan berprestasi.

Sudah banyak penelitian mengenai kepemimpinan transformasi baik didalam negeri maupun luar negeri seperti yang dilakukan oleh Sayyed Mohsen Allameh Sayyed dan Mohammad Reza Davoodi yang membahas tema Kepemimpinan transformasi pada lembaga jaminan sosial di iran hasilnya adalah bahwa terdapat hubungan yang kuat penerapan kepemimpinan transformasi dengan pengembangan nilai nilai karakter organisasi tersebut. (Allameh & Davoodi, 2011). Di Indonesia sendiri terdapat penelitian ihwal kepemimpinan transformasi seperti yang dilakukan oleh Ardillah, Daswati, Mukarramah yang membahas tema peran pemimpin transformasi kepala Desa di desa Pewunu kecamatan Dolo barat kabupaten Sigi di Indonesia dimana diperoleh dari kesimpulan kepemimpinan transformasional kepala desa Pewunu menggunakan pendekatan kepemimpinan motivasi inspirasional, yang mendeskripsikan karakter kepemimpinan koordinator desa pada saat menjalankan peran kepemimpinannya. Hal ini menginspirasi aparat desa guna memiliki keyakinan akan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan serta menyampaikan solusi guna melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Kendala utama dalam melaksanakan kepemimpinan desa adalah pengaruh, harga diri, dan mentalitas yang mempengaruhi rendahnya kinerja perangkat desa. (Ardillah et al., 2018) Sementara itu dalam kaitannya bencana ditemukan jurnal mengenai peran kepemimpinan dalam rangka menghadapi daerah rawan bencana, Adapun wilayah atau desa yang sering atau rawan terjadi bencana seperti yang ditulis oleh M. Alie Humaedi, M. Hisyam, Sari Seftiani, serta J. Victor Rembeth menggunakan tema efektifitas tentang kiprah

kepemimpinan lokal dalam upaya pengurangan resiko sebelum, pada saat serta pasca bencana di Indonesia. Konklusi dari temuan penelitian adalah mengidentifikasi potensi potensi berbagai prosedur sosial yang mungkin berperan untuk pengurangan risiko sebagai upaya mitigasi pasca bencana. Temuan ini penting sebagai upaya meminimalisir pengurangan risiko bencana. (Humaedi et al., 2013)

Namun dari jurnal-jurnal yang diperoleh belum ada tema yang membahas tentang kepemimpinan transformasi desa dalam menangani bencana COVID-19 dimana seorang pemimpin harus mengajak seluruh warganya untuk berperan aktif dalam menangkalkan masuknya virus COVID-19 ke daerahnya melalui proses mitigasi bencana. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui. Kepemimpinan transformasi desa dalam menghadapi Wabah COVID-19, penelitian tentang tema ini dalam signifikansinya sebagai bagian vital dalam manajemen sumber daya kepemimpinan dimana terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan membahas tema yang hampir sama. Namun, pembahasan yang menjadi obyek penelitian dari sejumlah penelitian di atas lebih kepada pembahasan peran kepemimpinan transformasional dalam kondisi normal dimana masyarakat tidak merasa terbebani akibat bencana wabah COVID-19. Adapun fokus yang menjadi perhatian dalam penelitian bagaimana peran pemimpin desa dalam menghadapi wabah virus corona serta penanganannya ditinjau dari sisi kepemimpinan transformasional dalam menghadapi mitigasi bencana penyebaran COVID-19 di daerahnya.

1.2 Pembatasan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di desa Panggunghardjo, provinsi Yogyakarta, pada bulan agustus hingga desember 2020. Yang menjadikan penelitian ini sebagai subjek penelitian adalah memahami pola kepemimpinan transformasional kepala desa dalam merespons wabah COVID-19..

Desa Panggunghardjo dipilih sebagai lokus penelitian dikarenakan desa tersebut meraih penghargaan sebagai desa dengan pelayanan terbaik dalam menghadapi COVID-19 sehingga diharapkan pola-pola pelayanan penanganan COVID-19 dapat diduplikasi kepada desa-desa diseluruh Indonesia.

1.3 Masalah Penelitian

Pola kepemimpinan di Indonesia ditiap-tiap wilayah selalu berbeda-beda, baik itu dari sisi budaya , tingkat Pendidikan, maupun letak geografis suatu wilayah.

sejatinya seorang pemimpin akan memiliki nilai koherenitas antara orang yang dipimpinnya dengan pemimpinnya. Terdapat beberapa permasalahan kasus kepemimpinan dalam penelitian ini. Pertama kasus penyaluran dana sosial yang terjadi dengan kepala desa di Indonesia yang mengalami permasalahan terhadap pola kepemimpinan yang diterapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan warganya akibat pandemi COVID-19. Sebagian dari kepala desa menyalurkan kebutuhan warga berupa bantuan sosial dari kementerian sosial atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya melalui ketua RT (Rukun Tetangga) masing-masing, namun laporan yang terjadi dari warga bahwa dana yang diterima tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga banyak warga yang mempertanyakan terhadap bantuan sosial tersebut kepada kepala desa bahkan hingga terjadi kericuhan didalam masyarakat. Setelah di investigasi ternyata dana bansos di korupsi oleh beberapa oknum RT yang tidak bertanggung jawab.

Selain permasalahan mengenai bansos muncul juga permasalahan mengenai efek dari karantina wilayah, terbatasnya infrastruktur kesehatan serta terbatasnya biaya untuk penanganan pandemi COVID-19. Pola pemenuhan kebutuhan warga desa seperti kebutuhan pangan pada saat diberlakukan karantina wilayah serta kebutuhan kesehatan pada saat warga terinfeksi virus COVID-19, dimana masih banyak kepala desa yang belum mengetahui model penanganan secara baik dan benar.

Namun berbeda dengan kondisi kepala desa yang menimbulkan konflik horisontal sesama warga serta belum mengetahui penanganan wabah yang menyebar secara sporadis dan cepat. Kepala desa Panggunghardjo dapat membuat beberapa kebijakan untuk mencegah konflik sosial akibat Bansos melalui musyawarah desa. Beberapa kebijakan terkait efek dari penanganan pandemi dibidang sosial seperti penyaluran dana desa kepada warga yang belum terdata oleh pemerintah pusat dibicarakan didalam musyawarah desa. Sehingga efek dari pandemi ini yang menyebabkan warga yang sebelumnya digolongkan bukan dari kalangan penerima bantuan pemerintah menjadi golongan yang berhak mendapatkan penyaluran bantuan akibat kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau kehilangan pekerjaan yang disebabkan efek karantina wilayah dapat diakomodir dan dilakukan penanganan dampak ekonomi keluarga. Dalam musyawarah desa, masyarakat yang terdampak wabah ini diharapkan mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu dari sisi kesehatan dan ekonomi kepala desa Panggunghardjo meninjau situasi warga desa dalam bentuk online untuk semua warga desa, baik secara klinis maupun non

klinis. Diharapkan rumusan tersebut dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah desa Panggungharjo. PemDes akan melakukan yang terbaik untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan keamanan warganya. Dengan mengisi formulir online yang disediakan oleh pemerintah Desa Panggungharjo diharapkan partisipasi warga dalam upaya penanganan pandemi ini secara bersama-sama.

Peran kepemimpinan kepala desa sangat dominan dalam upaya mencegah konflik sosial dan menjamin kesehatan dan keselamatan warga desa dengan mengedepankan keadilan dan peran serta warga dalam upaya bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Pemimpin yang mempunyai kreatifitas dan inspirasi motivasi yang merupakan salah satu unsur kepemimpinan transformasional sangat dominan dalam memberdayakan kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan seorang pemimpin harus memiliki peran transformasional desa, peran kepala desa sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi terhadap masyarakat desa. Bagaimana Penerapan peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, dan peraturan-peraturan lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 harus dilaksanakan secara komperhensif, responsive dan terukur agar kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan kebutuhan ekonomi masyarakat desa seperti dana BanSos (Bantuan Sosial), perlindungan terhadap warga desa serta keberlangsungan ekonomi warga desa dapat terpenuhi tanpa harus melanggar aturan-aturan yang berlaku. Sikap individual yang mulai tumbuh dan mudarnya sikap gotong royong pada Sebagian masyarakat desa menjadi tantangan terhadap peran kepemimpinan kepala desa dalam mengajak masyarakat desa secara bersama-sama ikut aktif dan jangan acuh dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Sehingga permasalahan penelitian dapat di gambarkan seperti diagram dibawah ini.



Gambar 1.6 Masalah Penelitian

Sumber : Olahan Peneliti

1.4 Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan tentang penelitian kepemimpinan transformasional pada kepala desa. Sementara itu untuk subfokus penelitian adalah mengeksplorasi teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bass yaitu tentang stimulasi intelektual, motivasi inspirasi, pengaruh teridealisasi serta pertimbangan individu yang menjadi tolak ukur kepemimpinan transformasional seorang kepala desa.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah di antaranya sebagai berikut.

Bagaimana membangun kepemimpinan transformasional pada kepala desa dalam menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia yang terdiri dari empat dimensi (Bernard M.Bass, 2006) sebagai berikut :

- a. Pengaruh teridealisasi (*Idealized influence*),
- b. Motivasi Inspirasi (*Inspirational motivation*)
- c. Stimulasi Intelektual (*Intellectual stimulation*)
- d. Pertimbangan Individu (*Individualized consideration*)

1.6 Tujuan Penelitian

Membangun kepemimpinan transformasional pada kepala desa dalam menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia yang terdiri dari empat dimensi (Bernard M.Bass, 2006) sebagai berikut :

- a. Pengaruh teridealisasi (*Idealized influence*),
- b. Motivasi Inspirasi (*Inspirational motivation*)

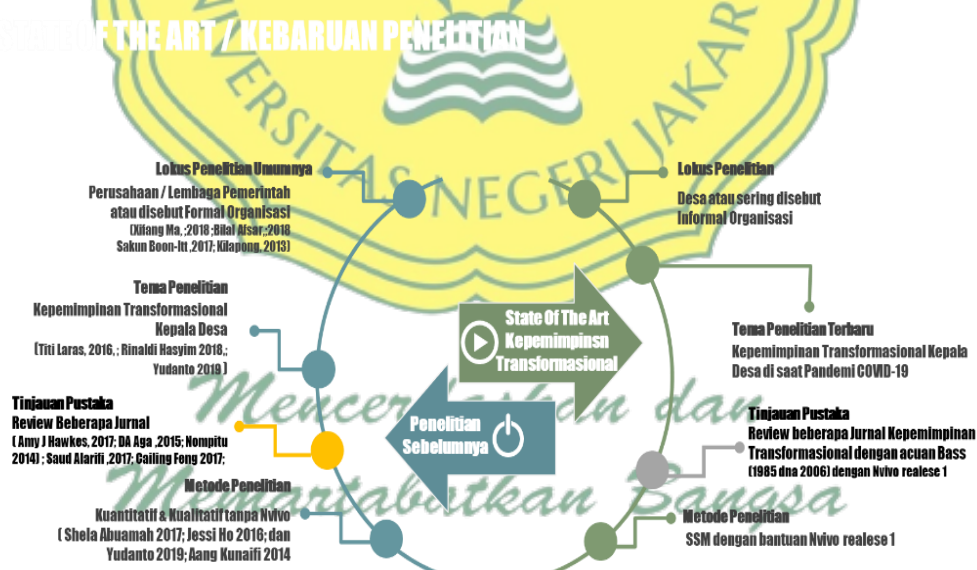
- c. Stimulasi Intelektual (*Intellectual stimulation*)
- d. Pertimbangan Individu (*Individualized consideration*)

1.7 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam upaya kalangan akademis memberikan kontribusi kepada pihak terkait. Dalam hal ini pemerintah dalam mengelola potensi peran kepemimpinan transformatif kepala desa di seluruh Indonesia dalam hal penanganan bencana COVID-19.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi berupa novelty hasil penelitian mengenai kepemimpinan transformasional kepala desa dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang bermanfaat untuk dikembangkan lebih lanjut oleh para seluruh peneliti lain dimasa depan untuk kepentingan akademis dan perkembangan teori kepemimpinan.

1.8 State Of The Art / Kebaruan Penelitian



Gambar 1.7 State Of The Art
Sumber : Olahan Peneliti